

## BAB II

### KERANGKA PEMIKIRAN

#### 2.1. Tinjauan Pustaka

Penelitian mengenai sosialisasi partai politik, khususnya pendidikan politik telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu yang dapat penulis jadikan sebagai rujukan untuk memperkuat rencana penelitian ini diantaranya Ahmad Saiful Ashar dengan judul penelitian *Pelaksanaan Pendidikan Politik Oleh DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Semarang*. Dalam penelitian ini, bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana penerapan pendidikan politik yang dilakukan oleh DPD PKS di Kabupaten Semarang dan kendala-kendala yang ditemukan oleh DPD saat pelaksanaan pendidikan politik tersebut.<sup>8</sup> Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pendidikan politik oleh DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak secara khusus diatur dalam program partai sendiri, akan tetapi pendidikan politik tertuang dalam program kerja bidang kaderisasi, keumatan dan kebijakan publik. Pelaksanaan pendidikan politik PKS di Kabupaten Semarang dilaksanakan dengan berbagai metode dan strategi antara lain, kegiatan pelatihan, pembinaan seminar, kajian-kajian sosial dan bakti sosial. Pendidikan politik PKS di Kabupaten Semarang pada pelaksanaannya tidak hanya selalu bermuatan politik saja tetapi terdapat materi-materi keagamaan/keislaman hal tersebut dikarenakan PKS merupakan partai dakwah.

---

<sup>8</sup>Ahmad Saiful Ashar, 2011. Jurnal Administrasi Negara, *pelaksanaan pendidikan politik oleh dpd partai keadilan sejahtera (pks) kabupaten semarang*.

Selanjutnya penelitian kedua dilakukan oleh Andi Ardian Syahrudin dengan judul *Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pendidikan Politik Bagi Masyarakat Oleh Partai Politik Di Kota Makasar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik*.<sup>9</sup> Penelitian ini, bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pendidikan politik bagi masyarakat dan untuk mengetahui konsekuensi yuridis terhadap pelaksanaan pendidikan politik bagi masyarakat oleh partai politik di Kota Makasar. Hasil dari penelitian ini menunjukkan: *Pertama*, partai-partai politik di Kota Makasar merumuskan program kerja terkait dengan politik mengacu pada AD/ART partai, hasil dari rapat kerja yakni program nasional ke program daerah dan dengan melihat kondisi masyarakat. *Kedua*, partai politik di Kota Makasar menerima bantuan dana yang bersumber dari APBD Kota Makasar yang digunakan sebagai dana penunjang pendidikan politik bagi kader dan anggota partai politik dan operasional sekretariat partai dan partai politik diwajibkan melakukan laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan tersebut kepada pemerintah Kota Makasar setelah diperiksa Badan Pemeriksaan Keuangan perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan.

Dari penelitian terdahulu, dapat ditarik benang merahnya bahwa, terdapat kesamaan dan perbedaan dengan rencana penelitian ini. Kesamaannya adalah, sama-sama meneliti tentang pelaksanaan pendidikan politik oleh partai politik. Sedangkan yang menjadi perbedaan antara rencana penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu: Ahmad Saiful Ashar dengan fokus penelitiannya pada pemberian pendidikan

---

<sup>9</sup>Andi Ardian Syahrudin, 2016. Jurnal Ilmu Pemerintahan, *tinjauan yuridis pelaksanaan pendidikan politik bagi masyarakat oleh partai politik di kota makasar berdasarkan undang-undang nomor 2 tahun 2011 tentang partai politik*.

politik dari partai politik terhadap masyarakat. Selanjutnya Andi Ardian dengan fokus penelitiannya pada kendala-kendala yang dihadapi saat pelaksanaan pendidikan politik bagi masyarakat. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan ialah terkait dengan gagalnya penerapan pendidikan politik oleh Partai Amanat Nasional bagi kader-kadernya sekaligus dengan faktor yang menghambat jalannya pendidikan politik bagi kader Partai Amanat Nasional.

## **2.2. Kerangka Konseptual**

### **2.2.1 Partai Politik**

#### **1. Pengertian partai politik**

Menurut Miriam Budiardjo partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya memiliki orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik, biasanya dengan cara konstitusional, untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka.<sup>10</sup>

Selanjutnya menurut Carl J. Friedrich, partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan kekuasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat ideal maupun materil.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Miriam Budiardjo. 2007. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama), hal. 11

<sup>11</sup> Carl J. Friedrich dalam Labolo. 2015. *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hal. 11

Selain pendapat para ahli tersebut, pengertian partai politik juga dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang partai politik, sebagai berikut : partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan Negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.<sup>12</sup>

Dari definisi yang cukup bervariasi di atas, dapat disimpulkan bahwa partai politik adalah organisasi politik resmi yang dibentuk oleh orang-orang yang mempunyai kepentingan yang sama dengan tujuan untuk menguasai pemerintahan dengan cara menempatkan anggota-anggota mereka dalam pemerintahan melalui mekanisme pemilihan umum

## **2. Tipologi Partai Politik**

Tipologi partai politik berkembang seiring dengan perkembangan demokrasi dan kedewasaan masyarakat dalam berpolitik. Perkembangan tersebut bisa dilihat dari ideologi, anggota, ataupun aturan-aturannya. Tipologi partai politik dibedakan berdasarkan beberapa klasifikasi, antara lain: (1). Berdasarkan asas dan orientasinya, (2). Berdasarkan komposisi dan fungsi anggotanya, dan (3). Berdasarkan kemungkinan untuk memenangkan pemilu.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik, Bab I, Pasal I Ayat I

<sup>13</sup> Safa'at Ali, 2011. *Pembubaran Partai Politik: Pengaturan Dan Praktik Pembubaran Partai Politik Dalam Pergulatan Republik*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Hal. 55

### **A. Asas dan Orientasi**

Partai politik berdasarkan asas dan orientasinya dapat dibedakan menjadi tiga jenis antara lain,

- 1) Partai politik pragmatis
- 2) Partai politik doktriner dan,
- 3) Partai politik kepentingan.

### **B. Berdasarkan Komposisi Dan Fungsi Anggotanya**

Berdasarkan komposisi dan fungsi anggotanya, partai ini dapat dibedakan menjadi tiga bagian

- 1) Partai massa/lindungan
- 2) Partai kader
- 3) Partai Catch-all

### **C. Berdasarkan Kemungkinan Memenangkan Pemilu**

Berdasarkan klasifikasi ini, partai politik dibedakan menjadi dua bagian,

- 1) Partai mayoritas, dan
- 2) Partai minoritas.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup>Labolo & Ilham Ibid Hal, 27-31 (penjelasan).

- A. Berdasarkan asas dan orientasi. (a), partai politik pragmatistis yakni suatu partai yang mempunyai program yang tidak terikat pada suatu doktrin dan ideologi tertentu. (b), partai politik doktriner yakni partai yang memiliki program konkret yang berdasarkan pada suatu ideologi tertentu. (c), partai politik kepentingan yakni partai politik yang dibentuk atas dasar kepentingan tertentu.
- B. Berdasarkan komposisi dan fungsi anggotanya. (a), partai politik massa/lindungan yakni partai yang mengutamakan dan mengandalkan jumlah anggotanya. (b), partai kader yakni partai yang tidak menekankan kepada banyaknya jumlah anggotanya melainkan fokus pada pembentukan loyalitas dan disiplin anggotanya sehingga tercipta sebuah partai politik yang

## 2.2.2 Sosialisasi

### A. Konsep Sosialisasi

Menurut Suyono sosialisasi adalah proses seseorang individu belajar berintegrasi dengan sesamanya dalam suatu masyarakat dalam sistem nilai, norma, dan adat istiadat yang mengatur masyarakat yang bersangkutan.<sup>15</sup> Menurut Suharto sosialisasi atau proses memasyarakatkan adalah proses orang-orang yang menyesuaikan diri terhadap norma-norma sosial yang berlaku, dengan tujuan supaya orang yang bersangkutan dapat diterima sebagai suatu masyarakat.<sup>16</sup> Sedangkan menurut Goslin sosialisasi adalah proses belajar yang dialami seseorang untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, nilai-nilai dan norma-norma agar ia dapat berpartisipasi sebagai anggota dalam kelompok masyarakat.<sup>17</sup>

Sehingga, dapat disimpulkan bahwa sosialisasi adalah suatu proses belajar serta mengenal norma dan nilai-nilai sehingga terjadi pembentukan sikap untuk berperilaku sesuai dengan tuntutan atau perilaku masyarakatnya.

### B. Sosialisasi Politik

Secara harafiah, sosialisasi berarti upaya memasyarakatkan sesuatu sehingga menjadi dikenal, dipahami, dihayati oleh masyarakat. Sedangkan sosialisasi politik

---

solid. (c), partai Catch-all yakni partai yang hampir serupa dengan partai massa, namun bedanya adalah partai ini seakan-akan ingin menyatakan dirinya sebagai perwakilan kepentingan bangsa secara keseluruhan. Kepentingan partai politik ini semata-mata memenangkan pemilu.

- C. Partai politik berdasarkan kemungkinan memenangkan pemilu. (a), partai mayoritas yakni partai yang secara rasional memiliki prospek untuk memenangkan pemilihan umum. (b), partai minoritas yakni partai politik yang tidak memiliki potensi untuk memperoleh suara yang signifikan.

<sup>15</sup>Suyono. 1985. *Kamus Antropologi*, Jakarta: Akademika Pressindo, hal. 41

<sup>16</sup>Suharto, dkk. 1991 *Tanya Jawab Sosiologi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hal. 56

<sup>17</sup>Ihromi. 1999. *Pokok-Pokok Antropologi Budaya*, Jakarta : Yayasan obor Indonesia, hal 30

adalah proses pembentukan sikap dan orientasi politik para anggota masyarakat. Melalui sosialisasi politik ini partai politik berusaha untuk menanamkan ideologi partai kepada masyarakat. Proses sosialisasi tersebut dilaksanakan secara sengaja dengan cara formal ataupun nonformal, maupun dengan cara tidak disengaja yaitu melalui hubungan bermasyarakat sehari-hari.

Pada hakikatnya sosialisasi politik merupakan proses individu dapat mengenali sistem politik yang meliputi sifat, persepsi, dan reaksi individu terhadap fenomena-fenomena politik. Sejalan dengan pemikiran Rush & Althoff menerangkan bahwa sosialisasi politik ditentukan oleh lingkungan sosial, ekonomi dan kebudayaan dimana individu berada, dan juga ditentukan oleh interaksi pengalaman-pengalaman serta kepribadiannya.

Sedangkan menurut Rafael Raga Maran mengatakan bahwa, sosialisasi politik merupakan proses bagaimana memperkenalkan sistem politik pada seseorang dan bagaimana orang tersebut menentukan tanggapan serta reaksinya terhadap gejala-gejala politik. Dalam hal ini, sosialisasi politik merupakan suatu proses pedagogis (proses pendidikan) atau suatu proses pembudayaan insan-insan politik.<sup>18</sup>

Dari beberapa pendapat para ahli tersebut, maka Labolo dan ilham berpendapat bahwa dalam melaksanakan sosialisasi politik terdapat dua metode yang ditempuh dalam penyampaian pesan, yakni (1).melalui pendidikan politik, dan (2). Melalui indoktrinasi politik.

Berikut ini urain dari kedua metode tersebut.

---

<sup>18</sup>Maram Rafael 2007.*Pengantar Sosiologi Politik*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, Hal. 136

### **1) Melalui pendidikan politik.**

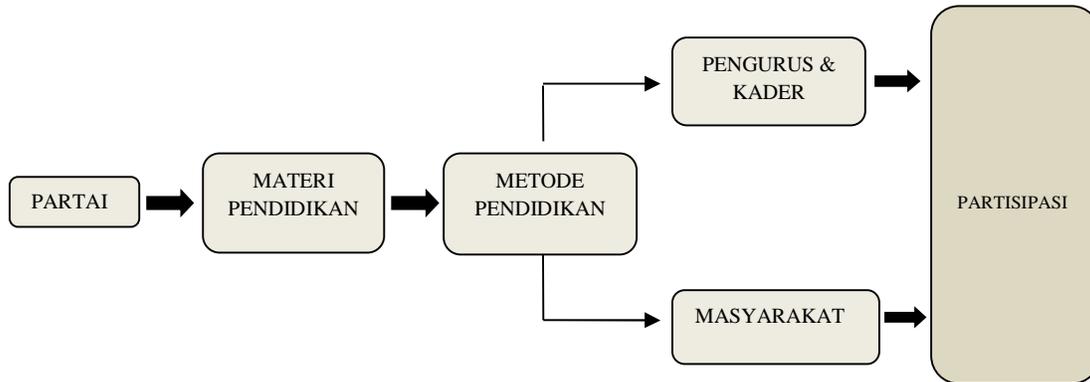
Pendidikan politik ialah suatu proses yang mengajarkan kepada masyarakat mengenai nilai-nilai, norma-norma, serta simbol-simbol politik melalui media berupa sekolah, pemerintah, dan juga partai politik. Proses pendidikan politik dapat dilakukan melalui kegiatan kursus, latihan kepemimpinan, diskusi dan seminar serta keikutsertaan dalam forum pertemuan. Selain itu, pendidikan politik juga diperlukan untuk menunjukkan bagaimana cara berpolitik yang sehat, bersaing secara sehat, dan mendidik masyarakat untuk mematuhi aturan. Berikut ini akan digambarkan proses pendidikan yang diselenggarakan oleh partai politik. Objek dari pendidikan politik tersebut terbagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok pengurus dan kader dan kelompok masyarakat.

Selanjutnya Ramlan Surbakti, pendidikan politik merupakan suatu proses dialogik antara pemberi dan penerima pesan. Melalui proses ini para anggota masyarakat mengenal, dan mempelajari nilai-nilai, norma-norma dan simbol-simbol politik negaranya dalam sistem politik. Pendidikan politik dipandang sebagai proses dialog antar pendidik, seperti sekolah, pemerintah, partai politik, peserta didik dalam rangka pemahaman, penghayatan dan pengamalan, nilai-nilai, norma-norma, dan simbol-simbol politik yang dianggap ideal dan baik.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup>Surbakti, 2005. *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: Grasindo, hal. 117

**Bagan 1**  
**Pendidikan Politik Oleh Partai Politik**



**Sumber:** Muhadam Labolo & Teguh Ilham, (Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia).

Partai politik memiliki kewajiban untuk melakukan pendidikan politik kepada pengurus dan kader serta masyarakat. Pendidikan politik yang dilakukan partai politik mencakup:

**a).Materi pendidikan**

Materi dari nara sumber yang disiapkan oleh partai, disampaikan dalam proses pendidikan politik kepada kader dan pengurus partai lebih berorientasi kepada pemantapan dan pengembangan program partai, peningkatan loyalitas dan dedikasi kader, peningkatan kualitas kemampuan kader untuk dapat berpikir futuristik. Materi yang disampaikan dalam proses pendidikan politik kepada masyarakat meliputi posisi, hak, kewajiban, dan

tanggung jawab setiap warga Negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dan konstitusi Negara.

#### **b).Metode pendidikan**

Berdasarkan penjabaran materi pendidikan diatas, diketahui bahwa materi pendidikan politik yang disampaikan kepada kader dan pengurus partai maupun masyarakat berbeda.Hal ini metedo yang digunakan untuk menyampaikan materi tersebut juga berbeda.Metode yang digunakan untuk menyampaikan materi kepada kader dan pengurus partai adalah penyampain yang intensif secara langsung untuk membentuk *mindset* mereka agar memiliki loyalitas dan integritas kepada partainya.

Metode yang digunakan untuk menyampaikan materi kepada masyarakat dapat berupa penyampain secara langsung maupun tidak langsung.Namun pada praktinya, penyampain materi lebih sering dilakukan secara tidak langsung, misalnya dengan menggunakan media masa sebagai perantara.

#### **c).Tujuan pendidikan**

Tujuan partai politik memberikan pendidikan politik bagi kader dan pengurus partai adalah untuk meningkatkan solidaritas politik dalam menjaga dan memelihara integritas bangsa, memberikan pengetahuan tentang tugas, fungsi, hak, dan kewajiban partai politik, serta untuk meningkatkan kapasitas kader dan pengurus partai.

Tujuan partai politik memberikan pendidikan politik bagi masyarakat adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam wadah Negara kesatuan republik Indonesia.

Diharapkan dengan diselenggarakannya pendidikan politik tersebut akan mendorong partisipasi politik dari kader dan pengurus serta masyarakat.

Selain itu menurut Prihatmoko mengatakan bahwa pendidikan politik oleh partai politik bertujuan untuk membentuk dan menumbuhkan kepribadian politik dan kesadaran politik, sebagaimana juga bertujuan untuk membentuk kemampuan berpartisipasi dalam individu agar menjadi partisipan politik yang aktif dan positif.<sup>20</sup>

## **2. Melalui indoktrinasi politik**

Indoktrinasi politik ialah proses yang dilakukan secara sepihak oleh penguasa untuk menanamkan nilai, norma, dan simbol yang dianggap baik oleh pihak penguasa tersebut kepada masyarakat. Biasanya indoktrinasi politik ini dilakukan oleh sistem politik totaliter yang dilakukan oleh melalui berbagai forum pengarahannya yang penuh paksaan psikologis dan latihan yang penuh disiplin.<sup>21</sup>

Sedangkan menurut Ramlan Surbakti, indoktrinasi politik ialah proses sepihak ketika penguasa memobilisasi dan memanipulasi warga masyarakat untuk menerima nilai, norma, dan simbol yang dianggap pihak penguasa

---

<sup>20</sup>Prihatmoko, 2003. *Pemilu 2004 Dan Konsolidasi Demokrasi*, Semarang: LP2I, HaL. 180

<sup>21</sup>Labolo & Ilham, 2015. *Partai politik dan sistem pemilihan umum di Indonesia*, PT. Raja grafindo, hal. 20-23

sebagai hal yang ideal dan baik, melalui berbagai forum penguasa yang penuh paksaan psikologis dan latihan yang penuh disiplin partai politik dalam sistem politik totaliter dalam melaksanakan fungsi indoktrinasi politik<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup>Surbakti Ramlan, 2005. *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: Grasindo, hal. 117